ABSTRAK

Pelaksanaan Perkawinan Suami Dalam Masa Iddah Isteri Akibat Thalak Raj'i menjadi kajian penting. Hal ini disebabkan adanya petunjuk teknis dari Dirjen Binbaga No.DIV/Ed/17/1979 Tentang Masalah Poligami Dalam Iddah. Untuk melihat bagaimanakah pelaksanaan perkawinan tersebut di Kabupaten Jepara dan seberapa jauh efektifitas Surat Edaran tersebut dan bagaimana solusi alternatif pemecahan masalah dikotomi pelaksanaan perkawinan tersebut menjadi salah satu alasan penelitian ini.

Metode pendekatan yang dipergunakan adalah yuridis sosiologis, hukum sebagai *law in action*, dideskripsikan sebagai gejala sosial yang empiris. Untuk melihat apakah pelaksanaan perkawinan suami dalam masa iddah isteri akibat *thalak raj'i* di Kabupaten Jepara apakah sudah ada kesesuaian antara peraturan yang berlaku dengan kenyataan sosialnya. Adapun data yang dipergunakan data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat Data primer ini berupa hasil wawancara terhadap pihak –pihak terkait seperti PPN dan atasannya serta para tokoh agama dan Pengadilan Agama terhadap para Pegawai Pencatat Nikah, di Kabupaten Jepara dan didukung dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa perundang- undangan, bahan hukum sekunder dan tersier.

Adapun hasil penelitian Para Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di Kabupaten Jepara sepakat bahwa laki- laki yang menthalak raj'i mantan isterinya dan masih menjalani masa iddah, dapat menikah kapan saja setelah ikrar thalak diucapkan di Pengadilan dan mendapatkan putusan cerainya. Hanya dengan pra syarat membuat surat pernyataan bermaterai Rp. 6.000 untuk tidak merujuk kembali mantan isterinya sudah dianggap memberikan kekuatan hukum. Alasan yuridis pelaksanaan perkawinan ini dikarenakan pada hakekatnya laki- laki tidak mempunyai masa iddah, isterilah yang mempunyai masa iddah atau melaksanakan *iddah*. Efektivitas Surat Edaran Dirjen Binbaga No.DIV/Ed/17/1979 Tentang Masalah Poligami Dalam Iddah sebagai petunjuk teknis pelaksanaan perkawinan suami dalam masa iddah isteri akibat thalak raj'i tidak mempunyai arti sama sekali, baik dilingkungan pengambil kebijakan ditingkat Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara c/q Seksi Bimas Islam sehingga berimbas pada para PPN (Pegawai Pencatat Nikah) sebagai ujung tombak pelaksana pernikahan. Demikian juga para tokoh agama di Kabupaten Jepara pun tidak mengenal ketentuan iddah bagi laki- laki, sehingga ketentuan *syibhul iddah* dan poligami dalam masa iddah menjadi tidak ada artinya.

Hanya para penegak hukum khususnya para hakim di Pengadilan Agama yang masih berpegang teguh dengan Surat Edaran tersebut. Namun yang lebih penting adalah membangun sinergi bagaimana kebijakan tersebut mempunyai implementasi yang dapat dilaksanakan oleh berbagai pihak. Untuk itu perlu dibangun kebijakan publik yang nilainya bukan hanya sekedar Surat Edaran saja yang kedudukannya dapat mengikat dan mempunyai norma hukum. Agar aturan tersebut dapat dilaksanakan oleh semua yang berkepentingan tanpa adanya penyelundupan hukum.

Kata Kunci: Perkawinan Suami, Iddah Isteri, di Kabupaten Jepara

ABSTRAC

The Implementation marriage Husband the prescribed period Wife Due In *Thalak Raj'i* into the pivotal study. This is due to the technical instructions of the Director General of Institutions Guidance No.DIV/ Ed / 17/1979 About Polygamy Problem In the waiting period. To see how the implementation of these marriages in the district of Jepara and how effective the Circular Letter and how solutions dichotomy implementation of alternative solutions that marriage is one reason this research.

The method used is sociological juridical law as the *law in action,* described as a social phenomenon empirically. To see if deploy on marriage husband wife in the prescribed period due to *thalak raj'i* in Jepara whether there is compatibility between regulations applies to social reality. The data used primary is data obtained directly from the primary data in the form of interviews conducted -side related parties such as VAT and superiors as well as religious leaders and religious Courts of the Registrar of Marriage Officer, at Regency Jepara and supported by secondary data consists of primary legal materials in the form of legislation, secondary and tertiary legal materials.

The research results Nikah Registrar Officials (PPN) in Jepara regency agreed that men who the first divorce ex-wife and is still undergoing the prescribed period, can marry anytime after pledge divorce spoken in court and get a divorce judgment. Only by making the letter pe prerequisite rnyataan stamped Rp. 6000 not to refer back ex-wife had considered giving the force of law. The reason is because the juridical execution of marriage is essentially man does not have the prescribed period, gods who have prescribed period or implement *iddah period.* Effectiveness Circular of the Director General of Institutions Guidance No.DIV / Ed / 17/1979 About Polygamy Problem In the waiting period as a technical guideline implementation husband marriage in the prescribed period due to thalak raj'i wife has no meaning at all, both within level policy makers Jepara District Office of Religious Affairs c / q Islamic Guidance Section so the impact on the VAT (Officer Registrar of marriage) as the spearhead of implementing a wedding. Likewise, religious leaders in Jepara regency was not familiar with the provisions of the waiting period for men, so that the provision *syibhul iddah* and polygamy within the prescribed period be meaningless.

Only law enforcement officials, especially judges in courts that still cling to the Circular Letter. But more important is to build synergy how policy has implementations that can be implemented by various parties. For it is necessary to build public policies whose value is not just a Circular Letter that position alone can bind to and have the rule of law. So that the rule can be implemented by all concerned in the absence of trafficking laws.

Keywords: Marriage Husband, Wife of The Waiting, Jepara Regency